



2024

RENCANA KERJA

BPKPD KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V
Telp. (0265) 543504 Fax. (0265) 543505

Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : KU.14.01/Kep.57/BPKPD/2023
LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja BPKPD Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
 20. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 3 APRIL 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : ku.14.01/kep.57/BPKPD/2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023
TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretaris : Perencana Ahli Muda

Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah

: Kepala Bidang Anggaran

: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

: Kepala Bidang Perbendaharaan

: Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah

: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

: Perencana Ahli Pertama

: Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/Kep.74/BPKPD/2023

LAMPIRAN :

TENTANG

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
20. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021– 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja BPKPD Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Dokumen Renja mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026, dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 dengan sistematika: Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup.

Dalam Renja BPKPD tahun 2024, BPKPD direncanakan melakukan **Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan untuk Akselerasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai tujuan tersebut** didukung oleh 4 Program 13 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.407.866.469.301,-. Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan satu tahun kedepan sehingga menghasilkan

perencanaan yang baik dan bertanggungjawab dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 11 Agustus 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I..... 1-1

PENDAHULUAN..... 1-1

 1.1 Latar Belakang.....1-1

 1.2 Landasan Hukum.....1-2

 1.3 Maksud dan Tujuan.....1-6

 1.4 Sistematika Penulisan.....1-6

BAB II.....2-1

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....2-1

TAHUN LALU.....2-1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....2-1

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....2-21

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....2-27

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....2-28

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....2-43

BAB III 3-1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 3-1

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....3-1

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....3-2

BAB IV..... 4-1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

BAB V PENUTUP..... 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020..... 2-4

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2-25

Tabel T-C 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 2-30

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran BPKPD..... 3-5

Tabel 3.2 Tujuan BPKPD..... 3-6

Tabel 3.3 Sasaran BPKPD..... 3-6

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama BPKPD..... 3-7

Tabel 4.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 4-3

Tabel 4.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 4-6

Tabel T-C 33 Rumusan Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan BPKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 4-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Sebagaimana tertuang dalam pedoman penyusunan Renja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2024. Dokumen Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dalam rangka menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dengan tema/arrah kebijakan pembangunan daerah yaitu “Pembangunan Infrastruktur dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dengan 10 prioritas pembangunan daerah. BPKPD sebagai unsur penunjang mendukung prioritas 8 yaitu mendukung pencapaian Inovasi Pelayanan Publik, serta untuk pembangunan Nasional mendukung dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung pembangunan Daerah dan Nasional tersebut BPKPD Kabupaten Tasikmalaya merencanakan program inovasi di bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Inovasi tersebut dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat, *stakeholder* ataupun pemangku kepentingan lain untuk dapat mengakses pelayanan yang ada di BPKPD. Salah satu inovasi yang direncanakan yaitu adanya *Call Center* pelayanan pajak daerah, dimana masyarakat dapat dengan mendapatkan jawaban atas pertanyaan pelanggan terhadap layanan yang ditawarkan oleh BPKPD diantaranya pertanyaan seputar pajak seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Restoran dll. Untuk mempertajam tujuan maka dicanangkan tema Renja BPKPD tahun 2024 yakni **Reformasi Birokrasi Pengelolaan Keuangan untuk Akselerasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya, yang akan mendorong peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
25. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 002 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
26. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian kinerja BPKPD yang didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun, Renja digunakan sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja BPKPD Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026 kedalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun;
2. Sebagai pedoman bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab.
Tasikmalaya Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana Perangkat Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2022 sebesar 89,63% dengan realisasi Rp. 728.381.042.897,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 812.612.389.333,00 hal tersebut menunjukkan bahwa penyerapan BPKPD telah efektif karena terdapat efisiensi sebesar Rp. 84.231.346.454,00 dengan capaian kinerja program/kegiatan sebesar 102,64%. Pada Tahun 2022 Penilaian terhadap BMD Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat dilaksanakan untuk penilaian Kendaraan Pemerintah Daerah dikarenakan terbatasnya waktu setelah APBD Perubahan ditetapkan dikarenakan perlu waktu yang cukup untuk melakukan penilaian kendaraan oleh pihak yang berwenang melakukan penilaian kendaraan. Kegiatan Penilaian terhadap kendaraan, tanah dan bangunan dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2022 dimana APBD Perubahan Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 2 November 2022.

Pada Tahun 2023 BPKPD melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 733.367.004.560,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD dan P3K sebesar Rp. 37.507.040.828,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 686.371.861.569,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 9.488.102.163,00. Realisasi

anggaran BPKPD sampai dengan triwulan II mencapai 40,45% atau sebesar Rp. 318.074.109.931,00 dengan persentase output kegiatan sebesar 38,37%. Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja sampai Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC- 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
							Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	K	Rp	K	Rp			
I	5	0	2			KEUANGAN				6.312.052.448.236		876.853.223.118		812.612.389.333		728.381.042.879	89,63		733.367.004.560	-	318.074.109.931	1.923.308.375.928	30	BPKPD
A	5	0	2	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	83	1.136.881.556.311	80	94.292.928.204	80	93.684.620.481	79,99	87.030.134.550	92,90	81	37.552.040.828	-	8.418.373.807	189.741.436.561	17	SEKRETARI AT
							Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	87	57.710.153.472	87	5.154.821.519	86,50	5.304.128.265	86,51	5.179.190.973	97,64	86,75	4.150.927.163	-	2.583.146.528	12.917.159.020	22	SEKRE TAR I AT
1	5	0	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	475	1.375.729.900	41	120.989.400	74	158.240.000	74	154.598.550	97,70	96	45.000.000	42	31.821.000	307.408.950	22	SEKRE TAR I AT

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
1	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	112	984.347.400	4	88.837.800	20	125.320.000	20	122.158.800	97,48	26	30.000.000	17	21.916.500	232.913.100	24	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	196	273.877.500	18	23.122.000	26	18.960.000	26	18.817.750	99,25		-			41.939.750	15	SEKRETARIAT
3	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	167	117.505.000	19	9.029.600	28	13.960.000	28	13.622.000	97,58	70	15.000.000	25	9.904.500	32.556.100	28	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persen	100	1.135.505.826.411	100	94.171.938.804	100	93.526.380.481	100	86.875.536.000	92,89	37.507.040.828	57,14	8.386.552.807	189.434.027.611	17	37.507.040.828	SEKRETARIAT
1	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	570	1.135.505.826.411	94	94171938804	1.344	93.526.380.481	1.344	86.875.536.000	92,89	37.507.040.828	95	8.386.552.807	189.434.027.611	17	37.507.040.828	SEKRETARIAT
3	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Persen	100	3.035.207.100	100	31.455.912	100	399.780.000	100	399.021.000	99,81	100	75.000.000	62,5	37.160.000	467.636.912	15	SEKRETARIAT

NO	Kode						Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2						3	4		5		6		7			8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
1	5	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1.062	3.035.207.100	111	31.455.912	164	399.780.000	164	399.021.000	99,81	8	75.000.000,00	5	37.160.000	467.636.912	15	SEKRETARIAT	
4	5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100	16.757.167.535	100	1.691.098.767	100	1.992.138.825	100	1.940.174.932	97,39	100	1.628.464.000	62,93	1.258.489.658	4.889.763.357	29	SEKRETARIAT	
1	5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	6	355.255.000	1	45.993.700	4	50.000.000	4	48.889.470	97,78	1	30.006.000	1/2	17.888.955	112.772.125	32	SEKRETARIAT	
2	5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	4.412.705.543	3	449.004.215	3	547.965.175	3	529.325.160	96,60	3	472.805.000	3	443.224.014	1.421.553.389	32	SEKRETARIAT	
3	5	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	533.482.106	4	60.638.550	4	121.835.650	4	121.624.263	99,83	1	40.000.000	1/2	18.557.100	200.819.913	38	SEKRETARIAT	
	5	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6	1.462.300.000	4	134.285.000	4	128.850.000	4	127.235.000	98,75	1	100.000.000	1	57.046.000	318.566.000	22	SEKRETARIAT	
5	5	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	4.195.536.150	2	521.125.760	2	593.560.000	2	569.077.264	95,88	1	530.154.000	1	472.668.000	1.562.871.024	37	SEKRETARIAT	

NO	Kode						Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2						3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
6	5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	893.500.000	4	31.720.000	4	43.800.000	4	39.600.000	90,41	4	34.499.000	2	12.770.000	84.090.000	9	SEKRETARIAT
7	5	02	01	2.06	07		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	6	329.137.536	1	39810000	1	40.000.000	1	39.211.900	98,03	-	-	-	-	79.021.900	24	SEKRETARIAT
8	5	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	72	720.490.000	12	109.200.000	12	130.000.000	12	130.000.000	100,00	4	96.000.000	2	63.340.000	302.540.000	42	SEKRETARIAT
9	5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	72	3.088.395.200	12	299.321.542	12	336.128.000	12	335.211.875	99,73	4	250.000.000	2	148.218.599	782.752.016	25	SEKRETARIAT
8	5	02	01	2.06	08		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	566.366.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1	25.000.000	1	24.776.990	24.776.990	4	SEKRETARIAT
9	5	02	01	2.06	09		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	1	50.000.000	-	-	-	-	SEKRETARIAT

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2					3	4		5		6		7		8	9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14	
6	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Persen	100	12.783.737.052	100	641.468.500	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	641.468.500	5	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	37	5.005.950.000			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	25	1.425.248.392	4	197.937.800	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	197.937.800	14	SEKRETARIAT
3	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	150	5.831.456.780	30	403.960.700	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	403.960.700	7	SEKRETARIAT
3	5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	5	521.081.880	1	39.570.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	39.570.000	8	SEKRETARIAT
6	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	12.522.154.014	100	1.586.672.435	100	1.675.231.190	100	1.622.129.250	96,83	100	1.467.463.163	66,67	702.419.111	3.911.220.796	31	SEKRETARIAT

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
1	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	7.148.249.232	12	917.568.020	12	1.000.795.000	12	979.950.629	97,92	12	778.294.000	6	313.951.208	2.211.469.857	31	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	6	440.516.200	1	62.000.000	1	62.000.000	100,00	1	57.000.000	1	50.000.000	174.000.000	39	SEKRETARIAT		
3	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	72	4.933.388.582	12	607.104.415	12	612.436.190	94,73	12	632.169.163	6	338.467.903	1.525.750.939	31	SEKRETARIAT		
7	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	12.611.887.771	100	1.204.125.905	100	1.236.978.250	98,45	100	980.000.000	56,06	585.077.759	3.007.069.455	24	SEKRETARIAT		
1	5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	70	4.907.570.715	70	583.961.105	280	639.896.250	280	628.372.332	98,20	70	600.000.000	70	237.200.563	1.449.534.000	30	SEKRETARIAT
2	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang dipelihara yang dipelihara	Unit	1.665	3.035.071.056	333	478.044.800	471	453.090.000	471	448.208.000	98,92	143	250.000.000	26	218.240.530	1.144.493.330	38	SEKRETARIAT

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
3	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4	4.669.246.000	1	142.120.000	3	143.992.000	3	141.285.459	98,12	3	130.000.000	3	129.636.666	413.042.125	9	SEKRETARIAT
B	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	5.054.991.868.534	100	773.592.270.240	100	705.978.017.087	100	628.880.648.466	89,08	100	688.481.975.569	28,61	305.895.794.305	1.708.368.713.011	34	BPKPD
1	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100	12.437.391.125	100	1.478.258.780	100	1.859.600.000	100	1.826.457.168	98,22	100	1.374.539.000	30,07	537.341.016	3.842.056.964	31	BIDANG ANGGARAN
1	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	6	877.478.000	1	111.322.720	1	95.000.000	1	85.672.194	90,18	1	50.000.000	-	-	196.994.914	22	BIDANG ANGGARAN
2	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	6	857.500.000	1	86.978.335	1	95.000.000	1	93.507.280	98,43	1	50.000.000	-	-	180.485.615	21	BIDANG ANGGARAN
3	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	354	600.978.000	59	86.919.670	59	96.000.000	59	95.458.301	99,44	59	40.000.000	-	-	182.377.971	30	BIDANG ANGGARAN
4	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	354	605.978.000	59	93.137.805	59	90.664.000	59	89.957.713	99,22	59	40.000.000	-	-	183.095.518	30	BIDANG ANGGARAN
5	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	354	588.700.000	59	74.085.750	59	73.175.000	59	73.068.710	99,85	59	40.000.000	59	39.866.120	187.020.580	32	BIDANG ANGGARAN

NO	Kode						Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2						3	4		5		6		7			8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
6	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	354	505.910.000	59	97.337.420	59	70.000.000	59	69.432.566	99,19	59	40.000.000	-	-	166.769.986	33	BIDANG ANGGARAN		
7	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	12	1.861.806.500	2	168.561.980	2	221.600.000	2	220.548.764	99,53	2	190.000.000	-	-	389.110.744	21	BIDANG ANGGARAN		
8	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	12	2.009.425.000	2	235.860.430	2	227.936.000	2	225.299.804	98,84	2	190.000.000	-	-	461.160.234	23	BIDANG ANGGARAN		
9	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	dokumen	9	521.250.000	-	-	2	100.000.000	5	99.989.611	99,99	2	80.000.000	3	72.830.168	172.819.779	33	BIDANG ANGGARAN		
10	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	6	2.509.632.500	1	429.340.890	1	511.400.000	1	506.414.406	99,03	1	330.000.000	-	158.120.000	1.093.875.296	44	BIDANG ANGGARAN		

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
11	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2.380	1.498.733.125	396	94.713.780	396	278.825.000	396	267.107.819	95,80	396	324.539.000	320	266.524.728	628.346.327	42	BIDANG ANGGARAN
2	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100	4.229.519.200	100	177.477.505	100	488.800.000	100	483.359.276	98,89	100	281.675.000	42	199.874.507	860.711.288	20	BIDANG PERBENDA HARAAN
1	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	236	623.499.500		-	-	-	-	-	0,00	59	92.875.000	59	92.725.000	92.725.000	15	BIDANG PERBENDA HARAAN
1	5	02	02	2.02		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	944	424.999.500		-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERBENDA HARAAN
1	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	72	1.073.412.850	12	89.020.000	12	194.400.000	12	193.045.743	99,30	12	94.400.000	5	51.574.000	333.639.743	31	BIDANG PERBENDA HARAAN

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
2	5	02	02	2.02	09	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	8	424.999.500			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	BIDANG PERBENDA HARAAN
2	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	72	1.107.608.100	12	88.457.505	12	194.400.000	12	191.986.633	98,76	12	94.400.000	5	55.575.507	336.019.645	30	BIDANG PERBENDA HARAAN
2	5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	1	150.000.000	-	-	1	100.000.000	1	98.326.900	98,33	-	-	-	-	98.326.900	66	BIDANG PERBENDA HARAAN

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
2	5	02	02	2.02	09	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	orang	260	424.999.750			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	BIDANG PERBENDA HARAAN	
3	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	7.709.312.941	100	423.583.742	100	1.011.000.000	100	892.460.546	88,28	100	453.900.000	28,80	181.131.477	1.497.175.765	19	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	80	1.178.500.000	-	-	16	114.400.000	16	112.005.256	97,91	16	100.000.000	6	32.000.000	144.005.256	12	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
2	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawab ban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	102	1.180.038.000	17	157.987.125	17	116.600.000	17	103.390.821	88,67	17	78.900.000	6	37.112.579	298.490.525	25	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
3	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Dokumen	5	825.000.000	-	-	1	50.000.000	1	47.507.634	95,02	1	50.000.000	1	25.654.238	73.161.872	9	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
4	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	12	1.663.815.000	2	229.947.617	2	225.000.000	2	203.866.448	90,61	2	150.000.000	-	86.364.660	520.178.725	31	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
		02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	98.500.000														

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisa si (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
5	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	16	1.245.410.941	-	-	2	305.000.000	2	243.627.226	79,88		-			243.627.226	20	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
6	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	4	330.000.000	-	-	2	75.000.000	2	69.687.688	92,92	1	50.000.000	-	-	69.687.688	21	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
7	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	orang	310	640.049.000	62	35.649.000	118	75.000.000	118	65.399.718	87,20	59	25.000.000	-	-	101.048.718	16	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
8	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Lembaga	160	548.000.000	-	-	40	50.000.000	40	46.975.755	93,95		-			46.975.755	9	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
4	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	5.030.615.645.268	100	771.512.950.213	100	702.618.617.087	100	625.678.371.476	89,05	100	686.371.861.569	14	304.977.447.305	1.702.168.768.994	34	BIDANG PERBENDA HARAAN

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
1	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	72	4.675.702.392.139	12	731.985.961.000	12	656.285.522.000	12	600.904.658.600	91,56	12	645.731.929.000	5	299.878.201.500	1.632.768.821.100	35	BIDANG PERBENDA HARAAN
2	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	laporan	6	283.897.874.625	1	31.452.485.213	12	35.683.508.570	12	15.926.092.876	44,63	1	30.000.000.000	-	4.547.773.805	51.926.351.894	18	BIDANG PERBENDA HARAAN
3	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	laporan	6	71.015.378.504	1	8.074.504.000	12	10.649.586.517	12	8.847.620.000	83,08	1	10.639.932.569	-	551.472.000	17.473.596.000	25	BIDANG PERBENDA HARAAN
C	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persen	91	9.828.325.000	81	562.182.990	80	1.158.000.000	81	952.917.682	82,29	83	516.000.000	81,63	193.863.400	1.708.964.072	17	BIDANG ASET
1	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	9.828.325.000	100	562.182.990	100	1.158.000.000	100	952.917.682	82,29	100	516.000.000	10,42	193.863.400	1.708.964.072	17	BIDANG ASET
1	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	8	1.610.295.705	2	176.628.475	2	130.000.000	2	125.125.765	96,25	2	70.000.000	-	24.427.000	326.181.240	20	BIDANG ASET
2	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	12	380.000.000	-	-	4	48.000.000	4	47.997.385	99,99	2	30.000.000	-	23.458.400	71.455.785	19	BIDANG ASET
3	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan	Laporan	23	2.377.088.225	7	239.124.825	7	755.000.000	7	555.548.600	73,58	4	227.000.000	-	32.798.000	827.471.425	35	BIDANG ASET

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14	
							barang milik daerah																		
3	5	02	03	2.01	11	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;	Dokumen	8	1.800.000.000			-	-	-	-	0,00					-	-	BIDANG ASET	
3	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	72	1.324.000.000	-	-	12	225.000.000	12	224.245.932	99,66	12	189.000.000	5	113.180.000	337.425.932	25	BIDANG ASET	
4	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	Orang	370	2.336.941.070	60	146.429.690	-	-	-	-	0,00					146.429.690	6	BIDANG ASET	
D	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100	52.640.544.919	100	3.251.020.165	100	6.487.623.500	100	6.338.151.208	97,70	100	2.666.061.000	23,96	982.931.891	10.572.103.264	20	BIDANG P2 DAN P3	
1	5	02	04	2.01		Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100	52.640.544.919	100	3.251.020.165	100	6.487.623.500	100	6.338.151.208	97,70	100	2.666.061.000	23,96	982.931.891	10.572.103.264	20	BIDANG P2 DAN P3	

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
1	5	02	04	2.01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Laporan	10	1.135.000.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	BIDANG P3
7	5	02	04	2.01	13	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	1.800.000.000	-	-	1	100.000.000	1	96.920.570	96,92	1	125.000.000	-	59.608.391	156.528.961	9	BIDANG P3
1	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	20	2.230.000.000	-	-	4	141.600.000	4	141.407.835	99,86	4	80.000.000	1	46.569.979	187.977.814	8	BIDANG P3

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4		5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14
2	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah ((buku Tanda Terima Sementara (TTS), Jumlah buku daftar harian penerimaan kependudukan (DHPP), Kartu pengawasan, surat pemberian pajak terhutang (SPPT double), surat tanda setoran (STTS double), Jumlah daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), Sewa Printonik))	Unit	35	8.180.152.859	6	1.167.419.250	6	1.604.080.000	6	1.564.393.328	97,53	6	1.050.000.000	1	316.134.950	3.047.947.528	37	BIDANG P2
3	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Laporan	15	3.487.900.000	-	-	8	254.000.000	8	250.126.909	98,48	1	50.000.000	-	23.351.504	273.478.413	8	BIDANG P3
4	5	02	04	2.01	07	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1.500.000.000			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	BIDANG P3

NO	Kode					Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 s.d TW II				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2					3	4	5		6		7		8		9	10		11		12= 6+8+11	13 = (12/5)	14	
4	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	OP	1.285.969	17.051.415.000	35.000	550.843.945	265.958	2.250.000.000	265.958	2.246.315.512	99,84	-	-	-	-	2.797.159.457	16	BIDANG P3
5	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah (jenis pelayanan)	Layanan	5	4.753.806.240	1	480.667.645	36	956.690.000	36	924.466.475	96,63	12	484.520.000	5	327.774.592	1.732.908.712	36	BIDANG P2
6	5	02	04	2.01	11	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	24	500.000.000	-	-	-	-	-	0,00	12	38.256.000	5	12.932.000	12.932.000	3	BIDANG P2	
6	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	72	7.225.574.070	12	445.274.550	12	808.253.500	12	744.521.997	92,11	12	754.000.000	5	156.101.470	1.345.898.017	19	BIDANG P2
7	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	20	4.776.696.750	4	606.814.775	4	373.000.000	4	369.998.582	99,20	4	84.285.000	1	40.459.005	1.017.272.362	21	BIDANG P3
							Persen	100	6.312.052.448.236	102	876.853.223.118	100	812.612.389.333	102,64	728.381.042.879	89,63	100	786.487.662.564	38,37	318.074.109.931	1.923.308.375.928	30	BPKPD	

Sumber : BPKPD, diolah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan, yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Secara umum capaian sasaran strategis BPKPD menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian tahun sebelumnya akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk tahun berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2022 sebesar 201,085% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,63%. Dalam pelaksanaannya BPKPD melaksanakan dengan efektif dan efisien dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 98,87%. Capaian strategis meningkatnya pertumbuhan pajak daerah dengan indikator yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 508,98%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya dukungan dari pelaksanaan inovasi daerah terkait penerimaan pajak.

Selanjutnya untuk sasaran Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel dengan Indikator Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dari target 80% terealisasi 80,77% dengan capaian kinerja sebesar 100,96. Sasaran Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Dan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 65 terealisasi 61,36 sehingga capaian kinerjanya mencapai 94,40%. Ketidak tercapaian pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi salah satunya dikarenakan terdapat aspek RB yang belum dilakukan penilaian oleh perangkat daerah pengampu urusan penunjang

kepegawaian yaitu dalam aspek Hasil berkaitan dengan survey internal organisasi.

Target indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai sebesar 78,019 dan nilai tersebut telah melampaui target akhir renstra sebesar 71,50, maka rekomendasi dari tim evaluator Provinsi untuk target selanjutnya sampai dengan akhir renstra harus disesuaikan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			67,50	78,019	79	80	66,489	78,019	78,019	79	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			65	69	73	77	N/A	61,36	69	73	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan			80	83	86	89	77,98	80,77	83	86	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah			5,01	5,11	5,18		7,97	25,21	5,11	5,18	IKU PD (Terdapat realisasi minus pada tahun 2020 dikarenakan adanya perubahan target pertumbuhan pajak yang diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid-19)

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
6	Persentase PAD			10,7	10,8	10,91	11,01	11,57	9,63	10,8	10,91	IKD
7	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA			2,69	2,44	2,19	1,94	6,19	4,56	2,44	2,19	IKD
10	Persentase SILPA			2,69	2,44	2,19	1,94	6,19	4,56	2,44	2,19	IKD
11	Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			4,69	4,59	4,49	4,39	5,81	3,94	4,59	4,49	IKD
13	Rasio PAD			1,16	1,24	1,32	1,41	0,95	0,72	1,24	1,32	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			59	60	61	62	65,51	64,84	60	61	IKD
15	Opini Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			13,64	13,54	13,44	13,34	4,14	1,57	13,54	13,44	IKD
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			8,01	7,91	7,81	7,71	12,45	9,09	7,91	7,81	IKD
18	Manajemen Aset			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
19	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			2,03	1,67	1,52	1,38	5,31	4,57	1,67	1,52	IKD
20	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb			1,16	1,24	1,32	1,41	0,95	0,72	1,24	1,32	IKD
21	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb			0,24	0,25	0,27	0,28	0,19	0,22	0,25	0,27	IKD

Sumber : *BPKPD, diolah*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

BPKPD selaku perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang bertindak dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan, memiliki isu penting yang harus segera diselesaikan. Fokus utama BPKPD pada tahun 2024 yaitu optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta peningkatan PAD khususnya pajak daerah dengan melakukan berbagai inovasi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan BMD Kabupaten Tasikmalaya dan Masih terdapat 226 bidang tanah yang belum tersertifikasi;
2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

3. Belum optimalnya penyusunan anggaran yang didukung oleh Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Per Kegiatan;
4. Belum optimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
5. Belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah;
6. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, BPKPD harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan atau belum sesuai. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Renja BPKPD Tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pengadaan mebel dan penambahan anggaran sebesar Rp. 198.380.000,00 dibandingkan dengan rancangan awal yang direncanakan akan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.407.668.089.301,00.

Penambahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di BPKPD berupa pembangunan ruang rapat baru yang representatif serta pengadaan *Uninterruptible Power Supply (UPS)* untuk pelayanan PBB. Sehingga pada tahun 2024 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.407.866.469.301,00. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel T-C 31 :

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82	593.807.534.201	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82	593.807.534.201	
							Nilai IKM Perangkat Daerah	86,8	5.592.892.200			Nilai IKM Perangkat Daerah	86,8	5.791.272.200	
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Dokumen	130.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Dokumen	130.000.000	
5	0	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	23 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	23 Dokumen	90.000.000	
5	0	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	72 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	72 Laporan	40.000.000	

5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	593.677.534.201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	593.677.534.201	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316 orang	593.677.534.201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1316 orang	593.677.534.201	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	447.340.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	447.340.000	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	152 Orang	363.150.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	152 Orang	363.150.000	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.190.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.190.000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.175.872.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.175.872.200	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	

5	0 2	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	520.084.80 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	520.084.80 0	
5	0 2	01	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	39.997.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	39.997.000	
5	0 2	01	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	200.000.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	200.000.00 0	
5	0 2	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	583.169.40 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	583.169.40 0	
5	0 2	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 dokumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 dokumen	50.000.000	
5	0 2	01	2.0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	128.000.00 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 laporan	128.000.00 0	
5	0 2	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	405.000.00 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	405.000.00 0	
5	0 2	01	2.0 6	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	199.621.00 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	199.621.00 0	

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	41.690.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	240.070.000	
5	02	01	2.07	0005						Pengadaan Mebel	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	81.690.000	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	41.690.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	158.380.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.628.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.628.000.000	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	890.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	890.000.000	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 laporan	63.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 laporan	63.000.000	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	675.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	675.000.000	

5	0 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.299.990. 000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.299.990. 000	
5	0 2	01	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	70 unit	749.990.00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	70 unit	749.990.00 0	
5	0 2	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang dipelihara	143 unit	350.000.00 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang dipelihara	143 unit	350.000.00 0	
5	0 2	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	200.000.00 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	200.000.00 0	
5	0 2	0 2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	799.616.9 92.900	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	799.616.9 92.900	
5	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1.686.992. 900	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1.686.992. 900	
5	0 2	02	2.0 1	00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 dokumen	95.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 dokumen	95.000.000	

5	0 2	02	2.0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	95.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	95.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	59 dokumen	65.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	200.000.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	200.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 1	00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	200.000.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	200.000.00 0	

5	0 2	02	2.0 1	00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 dokumen	80.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 dokumen	80.000.000	
5	0 2	02	2.0 1	00 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 dokumen	400.000.00 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 dokumen	400.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 1	00 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	396 orang	356.992.90 0	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	396 orang	356.992.90 0	
5	0 2	0 2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	475.000.0 00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	475.000.0 00	
5	0 2	02	2.0 2	00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	59 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	59 Dokumen	50.000.000	
5	0 2	02	2.0 2	00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	25.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	25.000.000	

5	0 2	02	2.0 2	00 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	150.000.00 0	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	150.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 2	00 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	100.000.00 0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	100.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 2	00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	150.000.00 0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	150.000.00 0	
5	0 2	0 2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	955.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	955.000.000	

5	0 2	02	2.0 3	00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	16 dokumen	150.000.00 0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	16 dokumen	150.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 3	00 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 laporan	110.000.00 0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 laporan	110.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 3	00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	3 Laporan	220.000.00 0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	3 Laporan	220.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 3	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	150.000.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan	2 dokumen	150.000.00 0	

										APBD Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/Kota			
5	0 2	02	2.0 3	00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	100.000.00 0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 dokumen	100.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 3	00 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 Dokumen	75.000.000	
5	0 2	02	2.0 3	00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	118 orang	100.000.00 0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	118 orang	100.000.00 0	
5	0 2	02	2.0 3	00 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	40 lembaga	50.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	40 lembaga	50.000.000	

5	0 2	0 2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	796.500.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	796.500.000.000	
5	0 2	02	2.0 4	00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	722.800.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	722.800.000.000	
5	0 2	02	2.0 4	00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan	60.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 laporan	60.000.000.000	
5	0 2	02	2.0 4	00 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	13.700.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	13.700.000.000	
5	0 2	0 3			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86%	1.634.000.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86%	1.634.000.000	
5	0 2	0 3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.634.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1.634.000.000	
5	0 2	03	2.0 1	00 01	Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 dokumen	100.000.000	
5	0 2	03	2.0 1	00 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	50.000.000	

5	0 2	03	2.0 1	00 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.00 0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.00 0	
5	0 2	03	2.0 1	00 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	4 laporan	384.000.00 0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	4 laporan	384.000.00 0	
5	0 2	03	2.0 1	00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.00 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.00 0	
5	0 2	03	2.0 1	00 11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 laporan	200.000.00 0	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 laporan	200.000.00 0	
5	0 2	03	2.0 1	00 13	Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kab/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mngikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	59 orang	100.000.00 0	Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kab/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah orang yang mngikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	59 orang	100.000.00 0	
5	0 2	0 4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	7.016.670. 000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	7.016.670. 000	
5	0 2	0 4	2.0 1		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	7.016.670. 000	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	7.016.670. 000	
5	0 2	04	2.0 1	00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	330.000.00 0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 Dokumen	330.000.00 0	

5	0 2	04	2.0 1	00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.00 0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	100.000.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 laporan	125.000.00 0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 laporan	125.000.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 Unit	1.330.000. 000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 Unit	1.330.000. 000	
5	0 2	04	2.0 1	00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	125.000.00 0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	2 laporan	125.000.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	200.000.00 0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	200.000.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	216.902 OP	2.250.000. 000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	216.902 OP	2.250.000. 000	

5	0 2	04	2.0 1	00 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	630.200.00 0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	630.200.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	100.000.00 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	100.000.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 11	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 dokumen	826.470.00 0	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 dokumen	826.470.00 0	
5	0 2	04	2.0 1	00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	1.000.000. 000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	1.000.000. 000	
Jumlah									1.407.668. 089.301					1.407.866. 469.301	

Sumber : BPKPD, diolah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah BPKPD. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari Tahun 2023 melalui media daring dan luring. Namun berdasarkan kegiatan tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa dalam lima tahun ke depan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mencapai visi tersebut Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut: 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mengacu pada tujuan 2 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) dengan sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini yaitu Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **"Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera"**, untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan 4 misi . BPKPD selaku

perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional**, dengan tujuan daerah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan sasaran daerah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan bersifat idealistik mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima”**. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Tema atau arah kebijakan pembangunana daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu “Pembangunan Infrastruktur dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” yang didukung oleh Prioritas Pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang mepakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ,meliputi:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemandirian Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

BPKPD selaku Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai unsur penunjang urusan keuangan, aset dan pendapatan daerah pada tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan 8 yaitu Inovasi pelayanan publik. Dalam rangka mendukung pembangunan Daerah tersebut BPKPD Kabupaten Tasikmalaya merencanakan program inovasi di bidang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Inovasi tersebut dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat, *stakeholder* ataupun pemangku kepentingan lain untuk dapat mengakses pelayanan yang ada di BPKPD. Inovasi pelayanan yang direncanakan yaitu adanya 1) *Call Center* pelayanan pajak daerah, dimana masyarakat dapat dengan mudah menanyakan berbagai pertanyaan seputar pajak seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Restoran dll 2) Aplikasi pelayanan berkas PBB *Online* 3) Monitoriing Pajak Daerah 4) E-Retribusi 5) Digitalisasi Aset. Inovasi tersebut dibangun bukan hanya dalam rangka mendorong pembangunan daerah saja tetapi untuk dapat

meningkatkan PAD agar kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya menunjukan peningkatan yang lebih baik sehingga menjadi Kabupaten yang mandiri.

Selanjutnya tujuan dan sasaran dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja beserta targetnya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan di BPKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target tahun 2024.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Akselerasi Implementasi SPBE	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2				Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3				Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4				Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Sumber : Renstra BPKPD

Tabel 3.2
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2024
1	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79

Sumber : *Renstra BPKPD*

Tabel 3.3
Sasaran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Indikator Sasaran PD Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,18

Sumber : *Renstra BPKPD*

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	86
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,18

Sumber : *Renstra BPKPD*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, Sasaran, Strategis dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatif selama tahun 2024. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Pada tahun 2024 BPKPD berfokus pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, peningkatan PAD, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD tidak hanya mendukung pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saja, namun harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tujuan BPKPD sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 16 dan 17. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif akuntabel dan inklusif di semua level serta tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Tasikmalaya. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya sebagai fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah namun juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD yaitu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2024 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.407.866.469.301,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD dan P3K sebesar Rp. 593.677.534.201,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp.

796.500.000.000,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 17.688.935.100,00.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut rekapitulasi sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

7		Fasilitasi Kunjungan Tamu
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
V		Pengadaan Barang Milik Daerah
1		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Pengadaan Mebel
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

3		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
3		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
6		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
7		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
8		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Pengamanan Barang Milik Daerah
4		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah

5		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
6		Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kab/Kota
7		Penatausahaan Barang Milik Daerah
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
I		Pengelolaan Pendapatan Daerah
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dan Daerah
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10		Penagihan Pajak Daerah
11		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber : BPKPD, diolah

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

Kode					Prioritas Pembangunan	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket.
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah							1.407.866.469.301	
5	02	01			Inovasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	599.598.806.401	
5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	
5	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	
5	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	593.677.534.201	
5	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	593.677.534.201	

5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.340.000	
5	02	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	363.150.000	
5	02	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.190.000	
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.175.872.200	
5	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	
5	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.084.800	
5	02	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.997.000	
5	02	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	
5	02	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	583.169.400	
5	02	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	50.000.000	
5	02	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	128.000.000	
5	02	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405.000.000	
5	02	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	199.621.000	
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.070.000	
5	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel	81.690.000	
5	02	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.380.000	
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.628.000.000	
5	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	890.000.000	
5	02	01	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	
5	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	675.000.000	
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.299.990.000	
5	02	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	749.990.000	

5	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	
5	02	01	2.09	0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	799.616.992.900	
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.686.992.900	
5	02	02	2.01	0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.000.000	
5	02	02	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.000.000	
5	02	02	2.01	0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	65.000.000	
5	02	02	2.01	0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	65.000.000	
5	02	02	2.01	0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	65.000.000	
5	02	02	2.01	0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	65.000.000	
5	02	02	2.01	0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.000.000	
5	02	02	2.01	0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200.000.000	
5	02	02	2.01	0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	80.000.000	
5	02	02	2.01	0011		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	400.000.000	
5	02	02	2.01	0013		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	356.992.900	
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	475.000.000	
5	02	02	2.02	0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000	

5	02	02	2.02	0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	25.000.000	
5	02	02	2.02	0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000	
5	02	02	2.02	0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100.000.000	
5	02	02	2.02	0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	150.000.000	
5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	955.000.000	
5	02	02	2.03	0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	150.000.000	
5	02	02	2.03	0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	110.000.000	
5	02	02	2.03	0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.000.000	
5	02	02	2.03	0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	150.000.000	
5	02	02	2.03	0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000	

5	02	02	2.03	0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	75.000.000	
5	02	02	2.03	0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	100.000.000	
5	02	02	2.03	0012		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	50.000.000	
5	02	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	796.500.000.000	
5	02	02	2.04	0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	722.800.000.000	
5	02	02	2.04	0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	60.000.000.000	
5	02	02	2.04	0010		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.700.000.000	
5	02	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.634.000.000	
5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.634.000.000	
5	02	03	2.01	0001		Penyusunan Standar Harga	100.000.000	
5	02	03	2.01	0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000	
5	02	03	2.01	0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	600.000.000	
5	02	03	2.01	0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	384.000.000	
5	02	03	2.01	0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.000.000	
5	02	03	2.01	0011		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	200.000.000	
5	02	03	2.01	0013		Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kab/Kota	100.000.000	
5	02	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.016.670.000	
5	02	04	2.01			Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.016.670.000	
5	02	04	2.01	0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	330.000.000	

5	02	04	2.01	0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100.000.000	
5	02	04	2.01	0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	125.000.000	
5	02	04	2.01	0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dan Daerah	1.330.000.000	
5	02	04	2.01	0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	125.000.000	
5	02	04	2.01	0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	200.000.000	
5	02	04	2.01	0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.250.000.000	
5	02	04	2.01	0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	630.200.000	
5	02	04	2.01	0010		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000	
5	02	04	2.01	0011		Penagihan Pajak Daerah	826.470.000	
5	02	04	2.01	0013		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.000.000.000	

Sumber : *BPKPD, diolah*

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya									1.407.866.469.301	APBD			1.548.434.898.232
5	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	82,00	593.807.534.201	APBD		83,00	653.188.287.622
						Nilai IKM Perangkat Daerah		86,80	5.791.272.200	APBD		87,00	6.370.399.420
5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	95 Dokumen	130.000.000	APBD		95 Dokumen	143.000.000
5	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	23 Dokumen	90.000.000	APBD		23 Dokumen	99.000.000

5	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	72 Laporan	40.000.000	APBD		72 Laporan	44.000.000
5	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	593.677.534.201	APBD		100%	653.045.287.622
5	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1316 orang	593.677.534.201	APBD		1316 orang	653.045.287.622
5	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	447.340.000	APBD		100%	492.074.000
5	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	152 Orang	363.150.000	APBD		152 Orang	399.465.000
5	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 Paket	84.190.000	APBD		2 Paket	92.609.000
5	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	2.175.872.200	APBD		100%	2.393.459.420

5	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	55.000.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	3 paket	520.084.800	APBD		3 paket	572.093.280
5	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	39.997.000	APBD		1 paket	43.996.700
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 paket	583.169.400	APBD		1 paket	641.486.340
5	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 dokumen	50.000.000	APBD		4 dokumen	55.000.000
5	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 laporan	128.000.000	APBD		4 laporan	140.800.000

5	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 laporan	405.000.000	APBD		4 laporan	445.500.000
5	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 dokumen	199.621.000	APBD		12 dokumen	219.583.100
5	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	240.070.000	APBD		100%	264.077.000
5	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Paket	81.690.000	APBD		1 Paket	89.859.000
5	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 unit	158.380.000	APBD		4 unit	174.218.000
5	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	1.628.000.000	APBD		100%	1.790.800.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 laporan	890.000.000	APBD		12 laporan	979.000.000

5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 laporan	63.000.000	APBD		1 laporan	69.300.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 laporan	675.000.000	APBD		12 laporan	742.500.000
5	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	1.299.990.000	APBD		100%	1.429.989.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	70 unit	749.990.000	APBD		70 unit	824.989.000
5	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara yang dipelihara	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	143 unit	350.000.000	APBD		143 unit	385.000.000
5	0	0	2.	00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	3 unit	200.000.000	APBD		3 unit	220.000.000
5	0	0			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	799.616.992.900	APBD		100%	879.578.692.190

5	0	0	2.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	1.686.992.900	APBD		100%	1.855.692.190
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	95.000.000	APBD		1 dokumen	104.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	95.000.000	APBD		1 dokumen	104.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	65.000.000	APBD		59 dokumen	71.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	65.000.000	APBD		59 dokumen	71.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	65.000.000	APBD		59 dokumen	71.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 dokumen	65.000.000	APBD		59 dokumen	71.500.000

5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	220.000.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	220.000.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	80.000.000	APBD		2 dokumen	88.000.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	400.000.000	APBD		1 dokumen	440.000.000
5	0	0	2.	00	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	396 orang	356.992.900	APBD		396 orang	392.692.190
5	0	0	2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	475.000.000	APBD		100%	522.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 Dokumen	50.000.000	APBD		59 Dokumen	55.000.000

5	0	0	2.	00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	236 Dokumen	25.000.000	APBD		236 Dokumen	27.500.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 Dokumen	150.000.000	APBD		12 Dokumen	165.000.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 Dokumen	100.000.000	APBD		2 Dokumen	110.000.000
5	0	0	2.	00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 dokumen	150.000.000	APBD		12 dokumen	165.000.000
5	0	0	2.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	100%	955.000.000	APBD		100%	1.050.500.000
5	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	16 dokumen	150.000.000	APBD		16 dokumen	165.000.000

5	0	0	2.	00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	17 laporan	110.000.000	APBD		17 laporan	121.000.000
5	0	0	2.	00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	3 Laporan	220.000.000	APBD		3 Laporan	242.000.000
5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	150.000.000	APBD		2 dokumen	165.000.000
5	0	0	2.	00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	110.000.000
5	0	0	2.	00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	82.500.000
5	0	0	2.	00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	118 orang	100.000.000	APBD		118 orang	110.000.000

5	0	0	2.	00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	40 lembaga	50.000.000	APBD		40 lembaga	55.000.000
5	0	0	2.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	100%	796.500.000.000	APBD		100%	876.150.000.000
5	0	0	2.	00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	12 laporan	722.800.000.000	APBD		12 laporan	795.080.000.000
5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	1 laporan	60.000.000.000	APBD		1 laporan	66.000.000.000
5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	1 laporan	13.700.000.000	APBD		1 laporan	15.070.000.000
5	0	0			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Kabupaten Tasikmalaya	100%	1.634.000.000	APBD		100%	1.797.400.000
5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	100%	1.634.000.000	APBD		100%	1.797.400.000

5	0	0	2.	00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	110.000.000
5	0	0	2.	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 dokumen	50.000.000	APBD		2 dokumen	55.000.000
5	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Laporan	600.000.000	APBD		1 Laporan	660.000.000
5	0	0	2.	00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Kabupaten Tasikmalaya	4 laporan	384.000.000	APBD		4 laporan	422.400.000
5	0	0	2.	00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	2 dokumen	200.000.000	APBD		2 dokumen	220.000.000
5	0	0	2.	00	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 laporan	200.000.000	APBD		12 laporan	220.000.000
5	0	0	2.	00	Pembinaan Pengelolaan Bmd Pemerintah Kab/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	59 orang	100.000.000	APBD		59 orang	110.000.000

5	0	0			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	100%	7.016.670.000	APBD		100%	7.718.337.000
5	0	0	2.		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	100%	7.016.670.000	APBD		100%	7.718.337.000
5	0	0	2.	00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	2 Dokumen	330.000.000	APBD		2 Dokumen	363.000.000
5	0	0	2.	00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	110.000.000
5	0	0	2.	00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kabupaten Tasikmalaya	4 laporan	125.000.000	APBD		4 laporan	137.500.000
5	0	0	2.	00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	10 Unit	1.330.000.000	APBD		10 Unit	1.463.000.000
5	0	0	2.	00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Kabupaten Tasikmalaya	2 laporan	125.000.000	APBD		2 laporan	137.500.000

5	0	0	2.	00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 laporan	200.000.000	APBD		1 laporan	220.000.000
5	0	0	2.	00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kabupaten Tasikmalaya	216.902 OP	2.250.000.000	APBD		216.902 OP	2.475.000.000
5	0	0	2.	00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	1 Layanan	630.200.000	APBD		1 Layanan	693.220.000
5	0	0	2.	00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	12 Dokumen	100.000.000	APBD		12 Dokumen	110.000.000
5	0	0	2.	00	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kabupaten Tasikmalaya	12 dokumen	826.470.000	APBD		12 dokumen	909.117.000
5	0	0	2.	00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	4 Dokumen	1.000.000.000	APBD		4 Dokumen	1.100.000.000

Sumber : *BPKPD, diolah*

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari proses perencanaan kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Perencanaan yang ditetapkan oleh BPKPD dituntut untuk dapat mendukung pencapaian VISI MISI Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Untuk dapat mendukung pencapaian tersebut, maka disusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun berjalan. Rencana Kerja ini dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi BPKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003